

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Politik

1. Definisi Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti kota atau suatu komunitas. Istilah lain dalam bahasa Yunani ialah *politeia* yang berarti warga negara. Politik pada mulanya berarti masyarakat yang berdiam di suatu kota.¹¹ Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.¹²

Budidardjo, dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik, mendefinisikan politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en damoria* atau *the good life*. Menurut Rod Hague et al, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu

¹¹ Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus*, Yogyakarta: Andi, 2009, 42.

¹² Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, 15.

bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.¹³

Jadi, dapat di simpulkan bahwa politik itu adalah usaha untuk memperoleh kesejahteraan, berupa kebaikan, kedamaian, keadilan, tentram, keteraturan dan sebagainya.

2. Konsep-Konsep Politik

Dalam narasi politik ada beberapa konsep-konsep politik di antaranya:

a. Masyarakat

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. McIver mengatakan: "Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of orderd relations*)."

b. Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur

¹³ Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis*, Kota Jambi: PT Akademia Virtual Media, 2021, 4.

hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

c. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku orang lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.¹⁴

Aristoteles (384-322 SM) merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik (*zoon politikon*). Dengan itu ia ingin menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat hal ini sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. Manakala manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan ketika mereka berupaya memengaruhi orang lain agar menerima

¹⁴ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, 46-59.

pandangannya, maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik.¹⁵

Banyak yang beranggapan politik itu membawa kerusakan, menciptakan konflik, memecah belah, sehingga oleh banyak orang, politik itu dibenci. Padahal mengasumsikan politik seperti itu adalah sesuatu yang keliru. Banyak yang salah memahami apa makna sesungguhnya dari politik. Politik yang jahat, berasal dari sebuah tabiat atau perangai manusia, yang harus ditempatkan terpisah dari makna politik. Politik sebagai ilmu dan politik sebagai perangai manusia adalah dua hal yang berbeda.¹⁶

3. Definisi Politik Praktis

Politik praktis adalah struktur dan upaya untuk memperoleh kekuasaan politik, baik bagi diri sendiri sebagai perseorangan atau atas nama partai. Dalam hal ini seseorang terlibat mencari kedudukan dan melaksanakannya dalam satu lembaga negara, sebagai perseorangan atau pun atas nama kelompok/partai. Disebut juga kegiatan politik praktis kalau seseorang membantu orang lain atau partai tertentu untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada. Berpolitik praktis merupakan panggilan awal

¹⁵ Carlton Clymer Rodee dkk (ed), *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, 2.

¹⁶Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis: Dari Teori ke Implementasi*, (Jambi: PT Akademia Virtual Media, 2021), 6.

untuk terlibat dalam struktur dan kegiatan politis, dengan berpartisipasi aktif di trias politik dan bidang politis lain.¹⁷

Faktual bahwa sistem dan kegiatan politik praktis sering disindir memerankan “permainan kotor”, sehingga sering kita dengar bahwa “politik kotor”. Sebutan demikian muncul karena cara dan tindakan berpolitik yang diperankan sering tidak mengindahkan etika politik yang baik dan benar. Politik praktis biasanya secara taktis berusaha memperjuangkan kekuasaan. Politik praktis biasa muncul dalam aktivitas pemilu, warga negara ketika itu melaksanakan hak-hak politiknya, menyuarakan pendapatnya dan juga menjadi bagian dari partai politik baik dalam bentuk keanggotaan parpol, simpatisan, atau juga pemilih parpol tersebut. Penyuaran hak-hak politik warga negara tertentu tidak hanya melalui pemilu. Warga negara bisa juga menyatakan aspirasinya dalam forum-forum lain untuk melakukan fungsinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat.¹⁸

4. Dampak Politik Praktis

Dampak keterlibatan hierarki gereja dalam politik praktis, antara lain:

¹⁷ ¹⁹Yong Ohoitmur, “Pelaksanaan Otonomi Daerah: Berpeganglah pada Etika Politik”, dalam Anicetus B. Sinaga et al, *Etos dan Moralitas Politik, Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2004), 223.

²⁰ Yong Ohoitmur, “Pelaksanaan Otonomi Daerah: Berpeganglah pada Etika Politik”, dalam Anicetus B. Sinaga et al, *Etos dan Moralitas Politik, Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2004), 223-224.

- a. Hilangnya otoritas rohani. Terlibat dalam politik praktis dapat menimbulkan kesan bahwa para pemimpin gereja menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan politik atau mencari dukungan dari kelompok tertentu. Hal ini dapat mengurangi otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin gereja sebagai gembala rohani.¹⁹
- b. Perpecahan dalam masyarakat. Terlibat dalam politik praktis dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan gereja, karena adanya perbedaan pandangan politik dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengganggu persatuan dan harmoni dalam masyarakat dan mengaburkan pesan moral etika yang ingin disampaikan oleh gereja.²⁰
- c. Penyalahgunaan kekuasaan. Terlibat dalam politik praktis dapat membuka peluang penyalahgunaan dana gereja untuk kepentingan politik, atau memberikan perlakuan khusus kepada kelompok atau individu tertentu.²¹

¹⁹ Joseph Ohoiledjaan, *Bahaya Keterlibatan Hierarki Gereja Dalam Politik Praktis*, Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral, Vol. 3. No. 1, Januari 2024, 181.

²⁰ Ibid. *Bahaya Keterlibatan Hierarki Gereja Dalam Politik Praktis*, 182.

²¹ Ibid. *Bahaya Keterlibatan Hierarki Gereja Dalam Politik Praktis*, 182.

- d. Memburuknya citra gereja. Terlibat dalam politik praktis dapat membahayakan citra gereja di mata masyarakat, khususnya jika tindakan politik yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang oleh ajaran gereja.²²
- e. Mengalihkan fokus dari tugas kudus. Terlibat dalam politik praktis dapat mengalihkan fokus dari tugas kudus para pemimpin gereja, seperti memberkati dan merawat umat yang dipercayakan kepada mereka.

B. Gereja

1. Definisi Gereja

Kata “gereja” berasal dari bahasa Portugis “Igreja”, dalam bahasa latin disebut “Ecclesia” dan dalam bahasa Yunani disebut “ekklesia” yang berarti perkumpulan pertemuan, rapat. Gereja bukan sembarangan perkumpulan, melainkan kelompok orang-orang khusus yang di panggil Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan-Nya. Terkadang “gereja” dipakai dengan kata “jemaat” atau “umat”, tetapi perlu diingat bahwa “jemaat” sangat istimewa.²³ Jemaat adalah persekutuan pribadi, persekutuan saudara, persekutuan hidup dan persekutuan Kristus. Pada

²² Joseph Ohoiledjaan, *Bahaya Keterlibatan Hierarki Gereja Dalam Politik Praktis*, Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral, Vol. 3. No. 1, Januari 2024, 182.

²³ Konfrensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 332.

persekutuan tersebut, Kristus sebagai Kepala segala yang ada, itu berarti segala sesuatu yang ada di bumi ada dalam Kuasa-Nya. Kristus adalah kepala jemaat, itu berarti jemaat adalah tubuh kepunyaan-Nya dan karena itu Ia mendapat bagian dalam segala sesuatu yang Ia kerjakan.²⁴

Gereja adalah tempat yang bisa memberikan setiap orang dapat menerima didikan rohani yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Alkitab. Menurut KBBI, gereja adalah gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, dan badan organisasi umat Kristen yang memiliki satu kepercayaan, ajaran dan tata cara ibadah. Dari pengertian kedua, gereja adalah organisasi maka orang-orang yang mengatur gereja memiliki suatu wewenang dalam mengatur kehidupan bergereja karena di dalam gereja tidak hanya pendeta, tetapi ada majelis dan jemaat. Gereja adalah pedoman belajar rohani bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Untuk itu, struktur dalam gereja adalah struktur yang melayani anggota-anggota gereja dalam rangka keterlibatan mereka, karena kepemimpinan gereja pada hakekatnya adalah kepemimpinan pelayanan.²⁵

Dalam bahasa Inggris, kata gereja adalah *Church* yang berasal dari bahasa *Kuriakon* yang berarti "Milik Tuhan". Kata ini biasa digunakan

²⁴ J.L. Ch. Abineno, *Garis-Garis Besar Hukum Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 25.

²⁵ Widi Artanto, *Gereja dan Misi-NYA: Mewujudkan Kehadiran Gereja dan Misi-Nya di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016), 17.

untuk menunjukkan hal-hal lainnya seperti tempat, orang-orang, atau demokrasi yang menjadi milik Tuhan.²⁶

Yang menjadi dasar gereja adalah umat atau persekutuan serta orang-orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu tujuan dari gereja adalah pertumbuhan hidup rohani orang Kristen secara pribadi. Pertumbuhan dan kedewasaan hidup rohani orang Kristen secara pribadi adalah dasar pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja harus dimulai dari kualitas hidup rohani.²⁷

2. Tugas Gereja (Tri Tugas Panggilan Gereja)

Gereja memiliki kurang lebih enam fungsi yakni pertama, gereja adalah persekutuan yang beribadah. Orang belajar beribadah dengan mengambil bagian dalam kebaktian. Kedua, gereja adalah persekutuan yang menebus. Artinya, kebutuhan dasar para anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat dipersatukan serta disembuhkan kembali. Ketiga, gereja sebagai persekutuan belajar-mengajar. Gereja menyediakan kesempatan belajar bagi orang dengan segala kategori usia. Dalam gereja, orang mencari jawaban dari Injil terhadap pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengalaman hidup. Keempat, gereja adalah persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain terutama yang sakit,

²⁶ Charles C Ryrie, *Teologi Dasar: Panduan Populer Untuk Memahami Kebenaran Alkitab* (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 1986), 143.

²⁷ Dr. Peter Wongso, *Tugas Gereja dan Misi Masa Kini* (Malang: SAAT, 1999), 69.

miskin, lemah, dan kesepian. Gereja berusaha melayani siapa pun, khususnya yang paling hina dan lemah. Kelima, gereja adalah persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang belum menerima kabar baik. Keenam, gereja adalah persekutuan yang bekerja sama dengan kelompok lain, baik kelompok berbeda agama, sosial, dan lain-lain.²⁸

Tiga tugas dan tanggung jawab gereja yaitu, *Koinonia* (institusional), *Marturia* (ritual) dan *Diakonia* (etika). Segi-segi itu merupakan keseimbangan yang terus-menerus harus dijaga karena ketika gereja hanya menekankan segi kelembagaan dan ritual, maka gereja hanya ada untuk dirinya sendiri, kalau pelayanan hanya dianggap sebagai aspek ritual atau alat untuk membantu organisasi gereja maka pelayanan tidak pernah akan menjadi pelayanan sosial yang menjangkau masyarakat luas.²⁹ Adapun penjelasan dari tri-tugas gereja adalah sebagai berikut:

- a. *Koinonia* (bersekutu), maksudnya hidup dalam persekutuan: sebagai anak Tuhan sebagai perantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Kita di panggil dalam persekutuan erat dengan Tuhan. Melalui *Koinonia* ini dapat menjadi sarana untuk membentuk jemaat yang

²⁸ Dien Sumiyatiningsih, *Mengajar Dengan Kreatif dan Menarik: Buku Pegangan Untuk Mengajar Pendidikan Agama Kristen* (Yogyakarta: ANDI, 2006), 27-29.

²⁹ E.G.Singgih, *Reformasi dan transformasi pelayanan Gereja Menyongsong Abad ke-21* (Jogjakarta: Kanisisus, 1997), 25-27.

berpusat kepada Kristus. Kita diharapkan dapat menciptakan kesatuan dan persekutuan antara jemaat dan jemaat antara masyarakat. *Koinonia* ini diwujudkan dengan menghayati hidup jemaat, yaitu bersama-sama berkumpul menghadap hadirat Tuhan, bernyanyi dan berdoa bersama, melakukan pelayanan sakramen, peneguhan dan penguatan orang yang lemah bahkan saling melayani dalam kepedulian bersama.

- b. *Marturia* (kesaksian), maksudnya adalah menjadi saksi Kristen bagi dunia, memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Memberitakan firman kepada orang yang belum percaya dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang Kristen. *Marturia* ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang percaya di tengah masyarakat maupun di tempat kerja. Melalui *Marturia* ini, umat Tuhan diharapkan dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Dengan kata lain bahwa gereja bertugas memberitakan injil dan juga memberitakan pelayanan lanjutan untuk pastoral dan pembinaan.³⁰
- c. *Diakonia* (pelayanan), maksudnya adalah melakukan cinta kasih melalui aktivitas pelayanan orang Kristen kepada orang yang berkekurangan, yang miskin, terlantar dan terpinggirkan. Gereja

³⁰ Sirait Jamilin, *Terpanggil Memperbaharui: Peranan Gereja, Pendeta dan Warga Jemaat* (Pematangsiantar: L-Sirana, 2011), 98.

membina dan mengajarkan kepada jemaat yang telah menerima berkat dan belas kasihan untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesamanya. Orang Kristen bukan mengasihi dengan perkataannya saja tetapi mengasihi dengan mewujudnyatakan pelayanan yang nyata (Yak.2:15-17). Melalui *diakonia* ini umat Tuhan menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka akan kesejahteraan sesamanya. Karena itu diperlukan adanya kerja sama dalam kasih, keterbukaan yang empati, partisipasi dan keikhlasan hati untuk berbagi satu sama lain kepentingan umat (Kisa. 4:32-35).³¹

3. Hubungan Gereja dan Politik

J. Philip Wogaman, membedakan empat tipe hubungan negara dan agama. Keempat tipe tersebut antara lain:

- a. Teokrasi, yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya pemimpin atau lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegara lewat berbagai kebijakan kenegaraan dan undang-undang untuk tujuan agama tersebut.³² Paham teokrasi ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan istilah Negara - Gereja. Yang dimaksud dengan Negara-Gereja adalah satu bentuk kehidupan bersama dalam sebuah Negara (*state nation*), undang-

³¹ Sirait Jamilin, *Terpanggil Memperbaharui: Peranan Gereja, Pendeta dan Warga Jemaat* (Pematangsiantar: L-Sirana, 2011), 98-99.

³² Wogaman, J. Philip, *Christian Perspectives On Politics*, Louisville: Westminster John Knox Press, 2000, 250.

undang yang berlaku dalam Negara itu disusun berdasarkan keyakinan religius dari agama tertentu. Dalam Negara- Gereja satu agama menentukan segala hal yang berlaku dalam Negara. Para pemimpin agama diangkat menjadi kepala Negara, Israel, dan Iran.³³

- b. Erastianisme, yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya para pemimpin politik telah mengeksploitasi agama untuk tujuan-tujuan negara. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe pertama. Disebut Erastisme mengikuti pandangan Thomas Erastus, teolog protestan Swiss Jerman abad XVI. Bentuk kehidupan Negara seperti ini menurut Wogaman terdapat terutama di Jepang dengan Shintoismenya. Hal serupa juga dapat dilihat ketika Stalin pada awal PDI merangkul Gereja Ortodox Russia. Yang paling nyata bentuk ini dapat dilihat dalam kehidupan Gereja Anglikan di Inggris.³⁴

Bentuk erastianisme memiliki kemiripan dengan bentuk Gereja-Negara. Yang dimaksud dengan Gereja-Negara adalah kehidupan bersama dalam suatu Negara (*state Nation*) pemerintah memberi jaminan keamanan atau perlindungan istimewa bagi gereja atau agama tertentu. Negara menjalankan pengawasan yang ketat dan memiliki wibawa yang besar dalam kehidupan sosial termasuk

³³ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Umat Allah di Tapal Batas: Percakapan Tentang Gereja Jilid II: Masa Kini Gereja*, dicetak oleh Alfa Design Kemiri II – Salatiga, 2011, 295.

³⁴ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Umat Allah di Tapal Batas: Percakapan Tentang Gereja jilid II: masa Kini Gereja*, dicetak oleh Alfa Design Kemiri II – Salatiga, 2011, 250-251.

kehidupan beragama, Negara mengatur semua hal termasuk agama mana yang harus diatur oleh warganya. Dalam Gereja-Negara bisa juga ditemukan agama lain, tetapi eksistensi agama itu dan hak-hak pemeluk agama ini sangat tidak menentu. Masih beruntung jika agama mereka tidak dipedulikan. Yang paling celaka ialah jika agama itu dan pemeluknya dianiaya dan ditindas oleh penguasa. Ini yang terjadi dengan keadaan agama Kristen pada periode awal berdirinya.³⁵

- 1) Pemisahan Gereja-Negara Yang Rusuh: yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya terjadi pemisahan yang sangat keras antara gereja dan negara. Dalam kasus-kasus tertentu, kehidupan keagamaan bahkan tidak diakui, atau tidak diperbolehkan. Wogaman memberi contoh kasus antilerisme abad XIX di Prancis. Di negara-negara Marxists, bahkan lebih ekstrim lagi, seperti yang terjadi di Albania tidak mengakui keberadaan agama, dan mempropagandakan ateisme.³⁶
- 2) Pemisahan Gereja-Negara Yang Ramah: yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya ada pemisahan yang tegas secara

³⁵ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Umat Allah di Tapal Batas: Percakapan Tentang Gereja jilid II: masa Kini Gereja*, dicetak oleh Alfa Design Kemiri II – Salatiga, 2011, 294.

³⁶ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Umat Allah di Tapal Batas: Percakapan Tentang Gereja jilid II: masa Kini Gereja*, dicetak oleh Alfa Design Kemiri II – Salatiga, 2011, 251.

legal antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Amerika Serikat oleh Wogaman disebut sebagai contoh yang sangat jelas akan tipe ini. Tipe ini telah dijamin dalam konstitusi Amerika Serikat juga dengan maksud untuk menjaga integritas dan indenpendensi lembaga-lembaga keagamaan itu.³⁷

Menurut Wogaman, pada tipe ini gereja dimungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik karena tidak adanya tekanan dari Negara. Oleh karena itu gereja harus ikut berupaya mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan Negara, dengan ikut berupaya menciptakan Negara hukum, serta menolak segala bentuk kekuasaan Negara yang otoriter dan totaliter.

³⁷ Wogaman, J. Philip, *Christian Perspectives On Politics*, Louisville: Westminster John Knox Press, 2000, 251.